

Partisipasi Dalam Musyawarah Dana Desa: Sebagai Bagian Penting dalam Pengelolaan Dana Desa

Mega Silvia¹, Emilia Agustini², Dewi Sartika³, Siti Nurhayati Nafsiah⁴, Elsyia Julianti⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Mega Silvia

E-mail: mega.silvia@binadarma.ac.id

Abstrak

Salah satu komponen penting dalam pengelolaan dana desa adalah musyawarah mengenai penggunaan dana desa. Musyawarah ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan nyata masyarakat desa dipertimbangkan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Diharapkan bahwa dosen program akuntansi Universitas Bina Darma berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menunjukkan hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kami berharap bahwa keterlibatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Kata kunci - Musyawarah Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pengabdian Masyarakat

Abstract

One of the important components in managing village funds is deliberation regarding the use of village funds. This deliberation must be carried out to ensure that the real needs and desires of the village community are considered, so that the development carried out can be carried out more efficiently and have a positive impact on their welfare. It is expected that lecturers from the Bina Darma University accounting program will participate in the village deliberation to demonstrate the relationship between universities and the community. We hope that this involvement can provide a positive contribution in advancing the development and welfare of Simpang Pelabuhan Dalam Village, Pemulutan District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra.

Keywords - Village Fund Deliberation, Village Fund Management, Community Service

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan dana desa adalah melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah harus mengatur kegiatan menggunakan pola swakelola, yang berarti bahwa pelaksanaan dan perencanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan sumber daya lokal dan tenaga kerja setempat. Ini memastikan bahwa dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain (Gasperz et al., 2023).

Warga desa terlibat dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan di Musyawarah Dana Desa (MDD) (Maryani & Eka, 2023). Konsep ini muncul sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa wewenang untuk mengelola dan mengatur sumber daya lokal dan potensinya. Tujuan dari Musyawarah Dana Desa adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Musyawarah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan perempuan desa, sehingga menciptakan mekanisme yang menerima suara semua orang (Rachmawati & Indudewi, 2024).

Musyawarah Dana Desa bertugas untuk memastikan bahwa dana desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil desa dan mendorong warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan prioritas pembangunan lokal (Merina & Cahyani, 2016). Selain itu, ini berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan solidaritas sosial dan membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Dalam situasi ini, Musyawarah Dana Desa bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola dana desa tetapi juga berusaha untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antara warga (Sadam et al., 2023).

Musyawarah Dana Desa memperkuat ikatan sosial dan budaya desa selain membangun infrastruktur fisik; ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal (Mulyati et al., 2023). Desa Simpang Pelabuhan Dalam, yang terletak di Kecamatan Pemulutan, menerima jumlah dana desa yang sama dengan desa lain di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk meningkatkan potensi Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, pendidikan, ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Menurut Permendes No. 5 Tahun 2015, penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan (Potolau et al., 2024).

Dana desa di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir digunakan untuk membiayai beberapa bagian pedesaan. Sejak pencairan dana desa pada tahun 2020–2023, dana ini digunakan untuk membiayai beberapa proyek di Desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Pemerintah desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir membuat laporan pertanggung jawaban dana desa yang menjelaskan bagaimana dana digunakan. Laporan ini berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir harus dapat mengelola dana desa dengan tepat sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan musyawarah dan pendampingan. Metode ini memungkinkan dosen prodi akuntansi dari Universitas Bina Darma untuk berkolaborasi dan mendampingi tentang cara anggaran desa dialokasikan untuk meningkatkan

kesejahteraan desa. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program kegiatan yang menguntungkan. Hasil musyawarah dana desa dapat diterapkan dengan efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu mekanisme partisipasi dalam manajemen dana desa di Indonesia adalah Musyawarah Dana Desa (MDD). Dana desa sendiri adalah anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat di tingkat desa. Dosen Prodi Akuntansi dari Universitas Bina Darma memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Dana Desa di Desa Simpang Pelabuhan Dalam dari 22 Juli hingga 29 Juli 2024. Kami berpartisipasi dengan cara ini sebagai bukti komitmen kami untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dalam musyawarah tersebut membahas tentang:

1. **Proyek Pembangunan Infrastruktur:**
Dibahas adalah proyek infrastruktur fisik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, sistem air bersih, dan lainnya di Desa Simpang Pelabuhan Dalam.
2. **Peningkatan Sektor Pendidikan**
Dalam musyawarah, dana dialokasikan untuk sektor pendidikan untuk hal-hal seperti membangun dan memperbaiki sarana pendidikan, memberikan beasiswa, dan program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di desa.
3. **Pengembangan Sektor Ekonomi**
Di antara hal yang dibahas adalah upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi desa, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil.
4. **Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan**
Dana Desa dapat digunakan untuk sektor kesehatan, seperti pembangunan puskesmas, program imunisasi, penyediaan layanan kesehatan dasar, dan upaya lain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa.
5. **Pemberdayaan Masyarakat**
Upaya pemberdayaan masyarakat seperti partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, program pelatihan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan adalah topik diskusi.
6. **Pengawasan dan Transparansi**
MDD membicarakan tentang mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Ini termasuk memberikan informasi kepada masyarakat, bertanggung jawab atas penggunaan dana, dan meminta pihak-pihak terkait untuk mengawasi.
7. **Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:**
Diberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka. Selain itu, diskusi ini memungkinkan warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan prioritas pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal.

Musyawarah Dana Desa bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tentang penggunaan dana desa mencerminkan kebutuhan dan keinginan nyata masyarakat desa, sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Diharapkan bahwa dosen program akuntansi Universitas Bina Darma berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menunjukkan kerja sama antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kami berharap partisipasi ini akan berkontribusi positif pada kemajuan dan kesejahteraan desa Simpang Pelabuhan Dalam. Selain ikut dalam musyawarah dana desa ini, kami juga turut membantu kepada desa dan kepala bidang keuangan untuk membuat rencana anggaran biaya yang akan dialokasikan pada berbagai alokasi dana yang telah disepakati bersama di desa simpang pelabuhan dalam.

Berikut adalah Foto Kegiatan yang kami lakukan:

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Gambar 1
Kegiatan pengabdian di desa simpang pelabuhan dalam

KESIMPULAN

Musyawarah dana Desa dapat memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil desa dan mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan prioritas pembangunan lokal. Selain itu, ini berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan solidaritas sosial dan membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Dosen Prodi Akuntansi dari Universitas Bina Darma dapat membantu pelaksanaan Musyawarah Dana Desa di Desa Simpang Pelabuhan Dalam melalui kegiatan ini. Diharapkan keterlibatan ini menunjukkan komitmen dan partisipasi dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Ini juga akan menjadi contoh nyata dari kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Darma yang telah memberikan dukungan moril dan materil untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan kami ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gasperz, J., Dominique, M. E., & Tibalia. (2023). *Mengungkap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Galala dan Negeri Latuhalat (Studi Kasus)*. 8(1), 1–15.
- Maryani, A. S., & Eka, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.38>
- Merina, C. I., & Cahyani, A. P. R. (2016). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Bina Akuntansi*, 19(5), 1–23.
- Mulyati, N. A., Aslami, N., & Nurlaila, N. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Di Bumdesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. *Jurnal Riset Ekonomi* ..., 1(4), 81–87.

- <http://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/966%0Ahttps://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/966/911>
- Potolau, M. J. N., Safriansyah, & Tamrin, S. H. (2024). Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sorong. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 13–28. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/12638/pdf>
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 187–196. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Sadam, I., Utomo, T., Nuswanto, A. H., Alokasi, P., & Desa, D. (2023). Program Pembangunan Desa di Desa Muktiharjo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(2), 14–25.